



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke : 16 (enam belas)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
3. Direktur Utama PT. Bio Farma;
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Kamis, 8 April 2021
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Strategi vaksinasi *Covid-19* dalam mencapai *herd immunity* di Indonesia;
2. Penjelasan terkait ketersediaan vaksin *Covid-19* untuk vaksinasi Program Pemerintah;
3. Penjelasan terkait kesiapan penyediaan vaksin *Covid-19* untuk vaksinasi Gotong Royong beserta regulasinya.
- Ketua Rapat : Charles Honoris/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Dilanjutkan oleh : Felly Estelita Runtuwene, SE./Ketua Komisi IX DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat : A. Fisik 21 orang Virtual 15 orang dari 50 orang
Hadir dan Virtual Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran;

- C. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta jajaran;
- D. Direktur Utama PT. Bio Farma: Honesti Basyir.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Direktur Utama PT Bio Farma, dibuka pukul 10.15 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dalam rangka percepatan pencapaian *herd immunity*, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan penyesuaian Peta Jalan Program Vaksinasi COVID-19, dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI sebagai berikut:
 - a. Menghitung ulang ketersediaan vaksin dengan mempertimbangkan skenario terburuk akibat pembatasan ekspor dari negara produsen vaksin;
 - b. Menghitung kembali kebutuhan anggaran program vaksinasi berdasarkan penghitungan di huruf a dan bila perlu mengusulkan perubahan anggaran penanganan COVID-19 bidang kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. Meningkatkan upaya diplomasi dengan berbagai negara produsen vaksin sekaligus meningkatkan inovasi dan penelitian vaksin dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin; dan
 - d. Mengakselerasi program vaksinasi untuk menjangkau kelompok lanjut usia dan seluruh tenaga pendidik.
2. Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Mediasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara tim penelitian uji klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-Cov-2 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/ Menkes/11176/2020 dan Badan POM RI, dengan melibatkan para ahli, dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memberikan pendampingan dan pengawasan secara intensif bagi pengembangan vaksin dalam negeri sehingga kemandirian pengadaan vaksin COVID-19 segera terwujud. Selanjutnya, Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI memberikan laporan pengembangan vaksin dalam negeri secara berkala ke Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Badan POM RI dan PT Biofarma bersinergi untuk memperkuat komunikasi publik program vaksinasi yang didukung dengan penyajian data yang akurat dan mudah dipahami.

5. Komisi IX DPR RI menyepakati akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, RDP dengan Badan POM RI dan RDPU dengan PT Bio Farma dalam masa reses untuk membahas perkembangan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI kepada Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI dan PT Biofarma paling lambat tanggal 16 April 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.35 WIB.

Jakarta, 8 April 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.
A-393